

Ketimpangan Sosial Dalam Bidang Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Donabella Juventia¹ Shafaa Alaadini Yuan²

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: donabella.205210179@stu.untar.ac.id¹ shafaa.205210228@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat cita-cita bangsa yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan pada hakikatnya merupakan bentuk usaha untuk mengembangkan potensi diri guna mengembangkan kemampuan, sehingga kedepannya dapat digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai tantangan dalam menyelenggarakan pendidikan yang merata di seluruh kawasan terutama di wilayah terpelosok yang akses pendidikannya masih cukup sulit. Hal tersebut tidak luput dari beberapa faktor, termasuk di dalamnya peran aktif dan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dengan demikian, diperlukan solusi-solusi nyata untuk mengatasi ketimpangan pendidikan yang hadir guna mencapai tujuan bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Ketimpangan Sosial, Pendidikan, Pemerataan Pendidikan

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia contains the ideals of the nation which aims to educate the nation's life. Education is essentially a form of effort to develop self-potential to develop abilities, so that in the future it can be used to improve human resources in Indonesia. In its implementation, there are still various challenges in organizing education that is evenly distributed throughout the region, especially in remote areas where access to education is still quite difficult. This is due to several factors, including the active role and cooperation between the government and the community. Thus, real solutions are needed to overcome the existing educational inequality in order to achieve the nation's goals.

Keywords: Social Inequality, Education, Educational Equality



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan pentingnya pendidikan bagi warga negaranya di Pasal 31 yang bermakna bahwa setiap warga berhak mendapat pendidikan dan pemerintah akan menyelenggarakan sistem pengajaran nasional yang telah diatur dalam perundang-undangan. Selain itu pada bagian pembukaan di alinea ke 4 yang memuat tujuan negara, termuat bahwa salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan hal tersebut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan batasan tersebut, Pasal 3 UU SISDIKNAS menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam mewujudkan pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun non-infrastruktur yang merata di Indonesia, pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang memiliki dampak cukup penting dalam hal pemerataan. Namun demikian hal tersebut tidak menutup fakta bahwa masih terdapat tantangan untuk mewujudkan pendidikan yang sama rata di Indonesia, terutama di kawasan-kawasan yang memiliki akses minim untuk dijangkau. Hal-hal seperti ini yang kemudian menimbulkan ketimpangan pendidikan antara kawasan perkotaan dengan pedesaan semakin melebar (Surayana: 2020).

Menurut Andi Agustang (2021), rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, serta mahal biaya pendidikan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa faktor dana maupun fasilitas yang tidak memadai pun tidak luput menjadi penyebab ketimpangan pendidikan di Indonesia. Kurangnya fasilitas pendidikan yang didukung dengan pendanaan yang minim menjadi permasalahan serius di kawasan pedesaan. Tidak sedikit di berbagai sekolah maupun tempat pendidikan lainnya yang memiliki bangunan tidak layak pakai dan cenderung dapat membahayakan masyarakat yang menggunakannya. Dana dari pemerintah pun terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan pada kawasan tersebut, oleh karenanya diperlukan campur tangan pemerintah dan lembaga yang berwenang untuk mengalokasikan dana tersebut agar pemerataan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Sarana dan prasarana yang kurang memadai inilah yang kemudian mempengaruhi kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang layak, termasuk di dalamnya kualitas pembelajaran yang minim sehingga sumber daya manusia Indonesia pun tergolong rendah.

Dengan fakta yang telah disebutkan sebelumnya, tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas dan sistem pendidikan di Indonesia pun masih tergolong sangat rendah. *World Population Review* pada tahun 2021 menempatkan Indonesia di peringkat ke-54 diantara 78 negara yang menunjukkan bahwa Indonesia masih berada jauh dibawah negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sedangkan untuk urutan 1 sampai 10 ditempati oleh Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, Perancis, Swiss, Jepang, Australia, Swedia, dan Belanda (Mondy: 2022). Berdasarkan uraian latar belakang diatas, para penulis tertarik untuk mengkaji serta mengetahui lebih dalam tentang ketimpangan pendidikan yang masih terjadi di Indonesia dan menarik serta menetapkan judul "Ketimpangan Sosial Dalam Bidang Pendidikan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.". Rumusan Masalah: Bagaimana ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat? Bagaimana solusi yang dapat diberikan terhadap isu ketimpangan pendidikan yang masih terjadi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto & Mamudji: 2017). Data yang diperoleh berasal dari hasil penelitian dalam bentuk tulisan yang sangat berguna untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Sifat penelitian ini adalah preskriptif, artinya penelitian yang merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dan bertujuan untuk menjawab isu yang diangkat dengan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dan memberikan saran maupun solusi dalam mengatasi permasalahan dalam penelitian ini (Ishaq: 2017). Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang dibagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan

hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu bahan hukum sekunder yang digunakan berupa hasil karya buku-buku, jurnal ilmiah atau artikel-artikel yang merupakan informasi atau bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*), yaitu inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan. Studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu bahan hukum dan informasi berupa buku maupun bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari, dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian (Soemitro: 1990).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat

Kesenjangan Pendidikan

Pendidikan adalah sarana bagi manusia untuk dapat memperluas potensi diri melalui proses pembelajaran yang di dapat. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini memperjelas bahwa pendidikan merupakan hak dari setiap individu untuk mendapatkannya. Dengan adanya pendidikan diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas dan mampu untuk memanfaatkan kemajuan dengan sebaik mungkin. Tanpa adanya pendidikan, maka tidak akan ada kemajuan. Oleh karena itu, pendidikan sangat krusial dan harus diberikan kepada setiap warga negara sejak dini. Dalam hal upaya mendorong pemerataan pembangunan, tentu erat kaitannya dengan pendidikan sebagai salah satu aspek pendukungnya. Pendidikan yang merata tentu akan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk menaikkan kualitas hidup, baik dari segi sumber daya manusia maupun pembangunan di kawasan sekitarnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pendidikan, termasuk di dalamnya perbedaan akses pendidikan yang signifikan antara kawasan perkotaan dan pedesaan terutama dalam hal kelompok sosial ekonomi yang berbeda (Novy, dkk: 2021).

Ketimpangan pendidikan diartikan sebagai kesenjangan atau perbedaan antara akses dan kualitas pendidikan yang diterima oleh masing-masing individu ataupun kelompok dalam suatu masyarakat. Hal ini dapat disebabkan dari berbagai macam faktor yaitu faktor ekonomi, sosial, politik, juga budaya yang berdampak bagi akses dan kualitas pendidikan yang diterima. Yagami memberikan definisi ketimpangan pendidikan, yaitu adanya ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya atau apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi (Dedi, dkk: 2015). Pendidikan sendiri diklaim sebagai hak dasar sebab hal tersebut adalah fondasi bagi pembangunan individu serta masyarakat yang berkualitas (Silaban: 1993). Hak atas pendidikan juga merupakan kunci untuk menciptakan dan membangun individu ke arah yang lebih baik, adil dan merata. Namun, kenyataannya masih banyak orang yang tidak memiliki akses atau kesempatan untuk meraih pendidikan (Raihan: 2023). Tingginya tingkat ketimpangan pendidikan yang terjadi di banyak sekali wilayah membuktikan bahwa jenjang pendidikan eksklusif hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat tertentu saja.

Pendidikan yang selama ini berlangsung di Indonesia dapat dikatakan kurang merata. Hal ini diakibatkan karena daerah ataupun wilayah yang dapat dikatakan kurang berkembang di Indonesia tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya dan tidak memperoleh kualitas pembelajaran yang baik. Pendidikan yang tidak merata tersebut dapat membawa dampak negatif bagi masa depan bangsa Indonesia, dimana beberapa kelompok masyarakat tidak memiliki ilmu yang cukup untuk dapat berperan aktif dalam masyarakat maupun

mengembangkan negaranya (Nindia: 2023). Dalam hal ini, perlu upaya lebih lanjut dari masyarakat dan pemerintah untuk dapat terus memperjuangkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan sehingga dapat mewujudkan pemerataan pembangunan yang lebih baik.

Wilayah yang memerlukan perhatian berkaitan dengan masalah rendahnya pemerataan pendidikan adalah wilayah pelosok negeri atau terpencil. Akses pendidikan sulit diselenggarakan di wilayah atau daerah tersebut, terutama daerah yang tertinggal. Ketidakseimbangan pemerataan pendidikan ini terlihat bila dibandingkan dengan wilayah perkotaan atau pemerintah, dimana akses pendidikannya cenderung merata. Namun, disisi lain terdapat juga masyarakat usia sekolah di daerah pusat kota yang tidak dapat menikmati pendidikan. Misalnya seperti anak-anak yang seharusnya bersekolah, namun mereka justru bekerja mencari uang di jalanan dengan mengamen dan sebagainya. Hal ini memberikan arti bahwa tidak seluruh masyarakat Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pemerataan pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah.

Faktor Penyebab Ketimpangan Sosial Dalam Bidang Pendidikan

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangatlah rendah serta tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Ketidakmerataan dalam pendidikan merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian serta tindakan yang cermat baik dari pemerintah, lembaga pendidikan ataupun juga masyarakat secara keseluruhan agar memastikan bahwa setiap individu mempunyai kesempatan sama untuk menerima pendidikan yang berkualitas. Para akademisi dan praktisi di bidang pendidikan mengkritisi sistem pendidikan Indonesia dikarenakan beberapa alasan, salah satunya adalah tidak seluruh masyarakat mendapatkan pendidikan yang setara. Pendidikan di Indonesia harus menangani masalah populasi yang besar, berkembang, serta beragam dengan perbedaan provinsi dalam tingkat partisipasi antar daerah (Azizah, dkk: 2018). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan, diantaranya (Anwar: 2017):

1. Rendahnya Fasilitas dan Infrastruktur Pendidikan. Ketidakmerataan pendidikan yang ada di Indonesia dapat disebabkan oleh kurangnya fasilitas dan infrastruktur. Salah satu syarat untuk menunjang keberlangsungan pendidikan, yaitu diperlukan fasilitas yang mumpuni, seperti gedung sekolah, media pembelajaran, maupun fasilitas lainnya yang diperlukan berkaitan dengan pendidikan. Sarana pembelajaran bagi masyarakat yang terdapat di daerah terpencil/ pelosok sangatlah rendah dibandingkan dengan kualitas sarana yang ada di kota-kota besar yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap. Kondisi tersebut akan mempengaruhi mutu pendidikan yang diterima, sehingga mereka akan mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan kemampuan dan keterampilannya.
2. Rendahnya Kualitas Tenaga Pengajar. Ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas akan sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan karena mereka mampu memberikan pendidikan yang baik kepada para peserta didik. Tenaga pengajar yang berpengalaman dan memiliki keterampilan yang memadai akan mengembangkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan terampil. Akan tetapi, di Indonesia ketersediaan tenaga pengajar tersebut masih menjadi masalah, sehingga pemerataan pendidikan tidak dapat tercapai. Situasi ini sangat mengkhawatirkan terutama di daerah terpencil dimana jumlah tenaga pengajar tidak mencukupi. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya tenaga pengajar berkualitas di daerah tersebut, salah satunya dikarenakan gaji bagi pengajar di daerah terpencil/terpencil jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan di perkotaan. Hal ini menyebabkan banyak tenaga pengajar yang tidak ingin bekerja di daerah tersebut. Selain itu faktor lain yang turut mempengaruhi, dimana menjadi tenaga pendidik di daerah terpencil bukan menjadi opsi utama bagi para pengajar profesional karena kebanyakan dari mereka lebih menargetkan untuk bekerja di pusat kota yang memiliki prospek kerja

lebih baik (Egy, dkk: 2022). Kurangnya pengalaman dari tenaga pengajar akan sangat berpengaruh bagi peserta didik karena mereka tidak mendapatkan pengajaran yang baik dan berkualitas.

3. Jumlah dan Kualitas Buku (Referensi). Buku dan referensi merupakan unsur yang membantu peserta didik dan pengajar untuk memperlancar proses pembelajaran. Ketersediaan buku serta kualitas buku merupakan suatu hal yang penting untuk perkembangan pendidikan sebab setiap satuan pendidikan memerlukan sarana yang meliputi media pendidikan, buku serta sumber belajar atau referensi lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan. Di beberapa daerah, akses terhadap buku-buku (referensi) berkualitas mungkin terbatas. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmerataan dalam pendidikan. Buku yang beragam dapat membantu mengembangkan kreativitas dan pemikiran kritis. Jika akses bagi peserta didik terhadap buku terbatas, maka mereka tidak memiliki kesempatan untuk dapat mengembangkan keterampilan tersebut.
4. Mahalnya biaya pendidikan; biaya pendidikan yang tinggi dapat menyebabkan ketidakmerataan dalam pendidikan. pendidikan yang terlalu mahal dapat menghambat akses terhadap pendidikan yang berkualitas bagi individu ataupun kelompok masyarakat lainnya yang menyebabkan ketidakmerataan dalam pendidikan. Biaya pendidikan dapat menjadi ukuran dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Misalnya, biaya pendidikan yang lebih tinggi akan diberikan banyak fasilitas yang memadai, sedangkan biaya pendidikan yang lebih rendah akan mendapatkan fasilitas yang minim. Selain itu, biaya pendidikan yang tinggi dapat menjadi faktor penentu bagi masyarakat untuk memilih melanjutkan pendidikan atau tidak. Masyarakat yang berasal dari keluarga dengan pendapatan yang rendah mungkin tidak mampu membayar biaya tersebut sehingga terpaksa menghentikan pendidikan atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan dalam kesempatan pendidikan antar kelompok-kelompok ekonomi. Pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran pendidikan untuk dapat menekan biaya yang harus ditanggung masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Namun kenyataannya, anggaran tersebut belum mampu dimanfaatkan dan disalurkan secara maksimal sehingga tidak tercipta pemerataan.
5. Standarisasi Pendidikan yakni Sekolah Berstandar Nasional (SNB) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Faktor ini mendapat perhatian dan mempengaruhi ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan yang terjadi di masyarakat. Pengelompokan sekolah tersebut mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus bertumpu pada landasan bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga negara. Dengan kata lain, pemenuhan hak atas pendidikan ini harus setara dan tidak boleh ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Sekolah yang memiliki status RSIB seringkali mendapatkan lebih banyak perhatian dari pemerintah dan mungkin memiliki akses yang lebih baik dibandingkan sekolah berstandar nasional. Selain itu, sekolah RSIB seringkali lebih dihargai dan menerima lebih banyak sumber daya. Hal ini akan meningkatkan tekanan pada sekolah berstandar nasional dan memperdalam kesenjangan antara keduanya. Kebijakan pemerintah mengenai RSIB telah menimbulkan perbedaan yang jelas dalam kualitas dan layanan pendidikan. pada hakikatnya, pendidikan yang berkualitas bukan hanya diperuntukkan bagi segelintir orang saja, namun untuk seluruh anak bangsa.
6. Kurangnya Partisipasi Masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik, mendukung, dan merata bagi semua orang. Selain itu, partisipasi masyarakat juga akan menciptakan kesesuaian dan

peluang yang sama bagi semua orang dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Akan tetapi, partisipasi masyarakat dinilai masih kurang berdampak bagi pendidikan. Hal itu dapat menyebabkan ketimpangan dalam pendidikan dikarenakan kurangnya masukan, keterlibatan dan keikutsertaan dari masyarakat (maula, dkk: 2023).

Menurut Efendy, terdapat tiga jenis kesenjangan dalam pendidikan yang dapat menyebabkan ketidakmerataan pendidikan, yaitu (Reindy & Siska: 2021):

1. Kesenjangan Struktural. Kesenjangan struktural dalam pendidikan disebabkan oleh kebijakan yang mungkin tidak memperhatikan atau bahkan memperburuk ketidakmerataan dalam aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti pendanaan yang kurang merata, kurangnya dukungan untuk sekolah-sekolah yang terletak di daerah yang terpencil, ataupun kebijakan-kebijakan yang tidak inklusif atau menyeluruh dapat memperdalam kesenjangan struktural ini.
2. Kesenjangan Kultural (Budaya). Kesenjangan kultural dalam pendidikan timbul karena adanya perbedaan dalam norma-norma budaya yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pendidikan. Misalnya, dalam beberapa kelompok masyarakat, masih terdapat pandangan bahwa pendidikan tidaklah penting. Selain itu, diskriminasi gender dapat menyebabkan akses terbatas terhadap pendidikan bagi perempuan. Di beberapa daerah, budaya atau norma yang menekankan pentingnya peran tradisional perempuan dalam keluarga atau masyarakat dapat menghalangi perempuan untuk mengakses pendidikan, terutama pada tingkat yang lebih tinggi. Kesenjangan kultural/budaya ini dapat menghambat upaya untuk menciptakan akses dan kesetaraan pendidikan yang merata bagi semua individu.
3. Kesenjangan Spasial. Kesenjangan spasial dalam pendidikan terjadi karena adanya perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini berhubungan dengan faktor geografis, dimana masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan seringkali menghadapi tantangan tambahan ketika mengakses pendidikan. Banyak siswa atau peserta didik yang harus melalui perjalanan jauh terlebih dahulu untuk dapat sampai di sekolah terdekat dari tempat tinggalnya, atau kurangnya akses transportasi dan jalan yang sulit.¹⁹ Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang sama seperti masyarakat yang tinggal di perkotaan.

Dampak Ketimpangan Pendidikan

Ketidaksetaraan pendidikan di Indonesia memiliki dampak yang luas, baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dampak dari ketimpangan pendidikan di Indonesia antara lain (Andri: 2024):

1. Kemiskinan. Ketidaksetaraan pendidikan dapat membuat lingkaran kemiskinan. Individu yang kurang mendapatkan akses dan kesempatan pendidikan yang layak akan cenderung memiliki peluang ekonomi yang terbatas. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan pendapatan yang semakin besar antara mereka yang berpendidikan tinggi dan rendah, serta memperburuk kemiskinan generasi berikutnya.
2. Kesenjangan Sosial. Ketimpangan pendidikan juga dapat memperburuk kesenjangan sosial antar kelompok dalam masyarakat. Individu atau kelompok dengan akses terbatas terhadap pendidikan seringkali tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperbaiki kondisi sosial ekonominya. Hal ini akan menciptakan kesenjangan yang lebih dalam dan ketidakstabilan dalam masyarakat.
3. Kurangnya Inovasi dan Pembangunan serta Daya Saing yang Rendah Ketimpangan pendidikan berdampak negatif terhadap inovasi dan pembangunan suatu negara. Ketika potensi manusia kurang dimanfaatkan karena kurangnya pendidikan, negara akan

kehilangan keunggulan kompetitif dan potensi untuk membawa perubahan positif. Hal ini juga akan mempengaruhi daya saing suatu negara secara global. Kesenjangan pendidikan yang besar akan mempersulit dalam mencapai inovasi, pengembangan industri, dan pertumbuhan ekonomi.

4. Tingginya Tingkat Pengangguran. Ketidaksetaraan dalam pendidikan juga berdampak pada tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan penduduk yang hanya memiliki pendidikan rendah. Mereka cenderung memiliki keterampilan yang kurang sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang semakin kompleks. Akibatnya, mereka kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi.
5. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia. Ketimpangan pendidikan juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang rendah akan berdampak pada keterbatasan dalam pengetahuan dan keterampilan dari individu. Hal ini akan membuat mereka kurang mampu bersaing dalam skala global.
6. Tertinggalnya Pembangunan Daerah. Daerah dengan akses terhadap pendidikan yang terbatas seringkali mengalami proses pembangunan yang lambat. Kurangnya investasi pada pendidikan di daerah-daerah tersebut dapat meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan antar wilayah yang lebih besar (Ginting & Rasbin: 2020).

Solusi Terhadap Isu Ketimpangan Pendidikan di Indonesia

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dan perlu diperhatikan kualitasnya, sebab dengan kualitas yang baik maka sumber daya manusia nya tentu akan maksimal. Dengan fakta bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong sangat rendah dibandingkan dengan negara lainnya di Asia Tenggara diperlukan upaya-upaya untuk menyelesaikan isu ketimpangan pendidikan yang masih terdapat di beberapa kawasan di Indonesia yang meliputi:

1. Memperkuat fungsi dan peranan Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP), tidak hanya diperlukan untuk menetapkan standar pendidikan dalam menyelenggarakan Ujian Nasional, namun juga untuk memperkuat tujuan tersebut guna semakin mempererat kerja sama dengan pemerintah. Selain itu untuk mengukur standar pendidikan, perlu memperhatikan kawasan yang akan diakses serta kelengkapan sarana maupun prasarana pendukungnya yang masih minim. Apabila masalah pemerataannya terletak pada perbedaan kualitas di pedesaan dan perkotaan, maka peningkatan pemerataan perlu difokuskan pada kawasan pedesaan. Melakukan pemerataan pendidikan tidak akan bisa lepas dari campur tangan pemerintah, sehingga pemerintah perlu memperbaiki sistem koordinasi daerah. Hal-hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan: 1) Pembangunan gedung atau fasilitas belajar untuk siswa di setiap kawasan yang minim akses pendidikannya; 2) Melaksanakan gotong-royong antar warga guna menjaga fasilitas pendidikan yang telah disediakan; 3) Mempekerjakan tenaga pengajar profesional ke kawasan yang kurang mendapat perhatian; 4) Menyelenggarakan program pendekatan kepada masyarakat, serta mengadakan edukasi terbuka mengenai pentingnya pendidikan (Kurniawan: 2016).
2. Memaksimalkan penggunaan teknologi guna mendorong serta mempermudah proses pendidikan, kehadiran program pemerintah yang menyelenggarakan penggunaan listrik di seluruh wilayah di Indonesia dengan harapan mampu menjadi sarana akses informasi. Selain itu, teknologi juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan sehingga dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Hal ini juga sebagai salah satu bentuk sarana untuk mengejar ketinggalan dalam mengakses informasi seperti di kawasan-kawasan besar lainnya.

3. Rendahnya kualitas tenaga pengajar dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan memerlukan sosialisasi guna meningkatkan kualitas tersebut, misalnya dengan *workshop, training, seminar*, dan lain-lain.
4. Memperhatikan serta meningkatkan kesejahteraan guru sebagai tenaga pengajar yang perannya tidak luput sebagai bagian penting dalam pendidikan. Dengan peningkatan kesejahteraan guru, maka pengembangan pengetahuan dapat terlaksana dengan maksimal sehingga kemudian mutu pendidikan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilaksanakan dengan membuat kurikulum yang matang dan sesuai dengan pembelajaran serta kebutuhan yang ada di lingkungan siswa dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran dengan adanya kerjasama yang baik antara wali murid.

Segala bentuk upaya yang dilakukan bertujuan untuk menyamaratakan kualitas pendidikan yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, sehingga tujuan bangsa Indonesia pun dapat tercapai dan terlaksana. Kehendak bahwa pendidikan yang berkualitas harus dapat dinikmati dan dirasakan oleh setiap warga negara Indonesia.

KESIMPULAN

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi pembangunan dan perkembangan individu, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Melalui pendidikan, setiap orang diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan mencapai tujuan hidupnya. Namun, kondisi pendidikan di Indonesia saat ini dinilai belum merata. Hal ini tercermin dari sangat terbatasnya akses terhadap pendidikan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau terpelosok. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan, yaitu rendahnya fasilitas dan infrastruktur pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar, jumlah dan kualitas buku (referensi) yang minim, mahalnya biaya pendidikan, standarisasi pendidikan SNB dan RSBI, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Selain itu, faktor lainnya yang menyebabkan ketidakmerataan pendidikan, yaitu kesenjangan struktural yang disebabkan oleh kebijakan, kesenjangan kultural yang disebabkan perbedaan norma budaya, dan kesenjangan spasial yang disebabkan perbedaan wilayah perkotaan dan pedesaan. ketimpangan pendidikan tersebut menimbulkan dampak negatif, yaitu kemiskinan, kesenjangan sosial, kurangnya inovasi dan pembangunan serta daya saing yang rendah, tingginya tingkat pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan tertinggalnya pembangunan daerah. Dengan demikian, peran pemerintah serta lembaga terkait dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Sebab keduanya saling berkaitan baik dengan proses maupun pemeliharaan peningkatan kualitas pendidikan yang merata. Kerja sama yang baik juga diperlukan tidak hanya untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, namun juga dalam menjaga hubungan serta kesejahteraan para tenaga pengajar guna terlaksananya pengembangan mutu pendidikan. Pendidikan merupakan awal dari berkembangnya sumber daya manusia pada suatu negara, sehingga keterlibatannya dalam memajukan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata. Sejatinya, kualitas pendidikan yang baik di Indonesia harus tersebar dengan merata sebagaimana yang telah dituangkan dalam tujuan negara dan menjadi cita-cita bangsa yang tidak dapat dikesampingkan.

Saran: Kepada pemerintah agar lebih memfokuskan dana anggaran untuk pembangunan fasilitas pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar serta mengawasi kebijakan atau program-program pendidikan yang diselenggarakan sehingga permasalahan pemerataan pendidikan dapat teratasi. Kepada masyarakat agar lebih mengutamakan dan sadar akan pentingnya pendidikan serta

berpartisipasi aktif sehingga mampu mendorong akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustang, Andi et al., "Masalah Pendidikan Indonesia". OSF Preprints. Tahun 2021. Ginting, Ari. M., & Rasbin., "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Sebelum dan Setelah Krisis". Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 2, No. 1 Tahun 2010.
- Firnandes, Andri. "Dampak dan Solusi Ketimpangan Pendidikan", www.Pacunews.com, 10 Januari 2024.
- Ginting, Egy. V., Ria. R. G., Roudhotul. J. H., & Laurensia. M. P. "Analisis Faktor Tidak Meratanya Pendidikan di SDN 0704 Sungai Korang". Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 3, No. 4 Tahun 2022.
- Hidayat, Anwar. "Kesenjangan Sosial Terhadap Pendidikan Sebagai Pengaruh Era Globalisasi". Jurnal Justisi Hukum, Vol. 2, No. 1 Tahun 2017.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959).
- Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- Ishaq. Metode Penelitian Hukum. (Bandung:Alfabeta, 2017).
- Juena, Nindia Aristi. "Akar Permasalahan Ketidakmerataan Pendidikan di Indonesia". www.Jurnalpost.com. 6 Desember 2023.
- Kurniawan, R. Y., "Identifikasi Permasalahan Pendidikan Di Indonesia Untuk Meningkatkan Mutu Dan Profesionalisme Guru", Makalah disampaikan pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi), (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2016).
- Larasati, Mondy. "Kualitas Pendidikan Indonesia". Journal of Educational and Language Research. Edisi No. 5 Tahun 2022.
- Maulana, Ismatul., Irwansi., Avid. L. S., Dorce. S. S., & Rolly. H. S. R. "Pendidikan Untuk Pemerataan Pembangunan: Memperjuangkan Hak Semua Anak". Jurnal Pendidikan, Vol. 5, No. 4 Tahun 2023.
- Muhadzib, Raihan. K., Umami. Y., & Grace. S. "Upaya Mengatasi Ketimpangan Pendidikan Menurut Konvensi Internasional". Jurnal Plaza Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1 Tahun 2023.
- Nurlaily, Novy. Y., Satria. U. W., Rudi. I., & Lis. H. "Pemenuhan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Pinggiran Perkotaan: Studi Kasus SD Budi Yakin Surabaya". Jurnal Dedikasi Hukum, Vol. 1, No. 2 Tahun 2021.
- Rudagy, Reindy., & Felia Siska., "Analisis Ketimpangan Pendidikan Pada Masa Covid-19 di Nagari Sisawah Kabupaten Sijunjung". Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya, Vol. 3, No. 1 Tahun 2021.
- Saputra, Dedi., Mohd. N. S., & Muhammad. N. "Analisis Ketimpangan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh". Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 3, No. 2 Tahun 2015.
- Sarafah, Azizah. A. & Udik Wibowo. "Program Zonasi di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia". Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Vol. 21, No. 2 Tahun 2018.
- Silaban, Sintong. Pendidikan Indonesia Dalam Pandangan Lima Belas Tokoh Pendidikan Swasta. (Jakarta: Dasamedia Utama, 1993).

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta:Rajawali Press, 2009).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990).
- Suryana. "Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan", Edukasi UNNES, Edisi No. 1 Tahun 2020.
- Vito, Benediktus., Hetty. K., & Risna. R., "Kesenjangan Pendidikan Desa dan Kota". Jurnal Prosiding KS: Riset dan PKM, Vol. 2, No. 2 Tahun 2015.